

KERJASAMA PKBM NURHIDAYAH DENGAN PEMERINTAH DESA SUKMULYA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA BELAJAR

Neneng Nurmalasari*

STITNU Alfarabi Pangandaran, Indonesia
Nurmalasarineng0@gmail.com

Aslih Wahidin

STITNU Alfarabi Pangandaran, Indonesia
aslihwahidin7@gmail.com

Dede Nuryani

STITNU Alfarabi Pangandaran, Indonesia
dnuryani695@gmail.com

Dede Sandy Noer Fauzi

STITNU Alfarabi Pangandaran, Indonesia
dedesandynoerfauzi@gmail.com

Miftahul Zamil

STITNU Alfarabi Pangandaran, Indonesia
jamilbulben@gmail.com

ABSTRACT

One of the non-formal education services needed by Sukamulya Village is in the form of a Community Learning Activity Center (PKBM) designed to meet community needs. The collaboration between PKBM and the village government in increasing community participation in education is an interesting matter to study because it relates to the low level of education in the village community. This study uses the PAR (Participatory Action Research) method. The process of building cooperation to increase community participation is carried out through the preparation of cooperation agreements, the implementation of cooperation plans, and evaluation. Projects implemented by PKBM include equity projects. The model of cooperation that is carried out is assistance and guidance in the form of policy and regulatory support, legal protection, budget assistance, assistance, and motivating the community. The scheme for increasing community participation in education carried out by the village government involves community outreach, intervention, and evaluation.

Keywords: Collaboration, PKBM, Village government.

ABSTRAK

Salah satu layanan pendidikan nonformal yang dibutuhkan desa sukamulya adalah berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kerjasama antara PKBM dengan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pendidikan menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena berhubungan dengan Tingkat pendidikan masyarakat desa yang masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Proses membangun kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui penyusunan kesepakatan kerjasama, implementasi rencana kerjasama, dan evaluasi. Proyek yang dilaksanakan oleh PKBM meliputi proyek kesetaraan. Model kerjasama yang dilakukan adalah pendampingan dan pembinaan berupa dukungan kebijakan dan regulasi, perlindungan hukum, pendampingan anggaran, pendampingan, pendampingan dan memotivasi masyarakat. Skema peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu penjangkauan masyarakat, intervensi, dan evaluasi.

Kata Kunci : Kerjasama, PKBM, Pemerintah desa.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara suatu negara tidak terlepas dari perkembangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu negara. Pengembangan sumber daya manusia erat kaitannya dengan visi lembaga pendidikan yaitu untuk mewujudkan konsep belajar sepanjang hayat sebagai pembelajaran yang berkelanjutan.

Lembaga pendidikan menurut Marzuki dalam (Widiyantoro, 2021) berfungsi sebagai mitra masyarakat, terutama dalam mempengaruhi pengalaman, literasi budaya, dan kondisi sosial ekonomi. Pendidikan menunjang pembangunan suatu negara dan bangsa dengan memungkinkan seseorang mewujudkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Output pendidikan dapat dilihat dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perkembangan di bidang lain. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kurang pentingnya integritas pendidikan karena dipandang tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.

Menurut data yang dihimpun pemerintah desa sukamulya, angka lulusan pendidikan formal di masyarakat sangat rendah. Pada 21 Januari 2023, jumlah penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5,38%, tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 55,01%, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak

34,48%, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2,30%, tamatan diploma 0%, dan tamatan sarjana 2,82%. Di mata masyarakat desa, keberadaan lembaga pendidikan dianggap tidak penting karena output yang dihasilkan tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi rumah tangga.

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, baik formal maupun nonformal melalui sekolah. Menurut Marzuki dalam (Widiyantoro, 2021), sekolah merupakan mitra masyarakat yang bertanggung jawab mengubah cara pandang, pengalaman, dan pola kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Badan Pengembangan Pendidikan Masyarakat (2012), kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan nonformal semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu layanan pendidikan nonformal yang dibutuhkan desa sukamulya adalah berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM adalah bentuk pendidikan nonformal yang dirancang untuk membantu meningkatkan status ekonomi masyarakat dan memberantas buta huruf dan putus sekolah. Konsep pendidikan nonformal bersifat jangka pendek, menekankan pada kompetensi yang dihasilkan berupa kompetensi fungsional untuk kepentingan saat ini atau masa depan.

Menurut Sihombing dalam (Almaidah, 2017) PKBM adalah lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan bakatnya, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara lebih mandiri, termasuk meningkatkan pendapatannya.

PKBM merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan nonformal dengan tujuan memperluas kesempatan bagi warga masyarakat agar mampu: (a) Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, (b) Meningkatkan kualitas hidupnya, (c) Pemberdayaan potensi masyarakat di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya, misal melalui pendirian Kelompok Belajar Usaha (KBU). PKBM juga menyelenggarakan program pendidikan dan keterampilan yang terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan warga masyarakat.

Tujuan khusus pendirian PKBM adalah untuk memandirikan masyarakat, membentuk kelompok usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program yang dijalankan antara lain paket pemerataan, pendidikan kewirausahaan dan taman bacaan masyarakat. PKBM dapat dikatakan maju apabila terjadi

partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi kemajuan PKBM.

PKBM sebagai tempat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, perlu kerjasama dengan pemerintah desa untuk memperkuat tujuan pendidikan unit PKBM. Kemitraan tersebut bertujuan untuk memberikan peran kepada desa sebagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga belajar.

Menurut Ardilah, Makmur, dan Hanafi (Ardilah et al., 2014) dapat diwujudkan melalui dorongan tokoh masyarakat kepada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Keberhasilan kerjasama dalam membentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat didasarkan pada beberapa hal yaitu: (a) kualitas program yang ada di dalam PKBM harus menguntungkan bagi warga belajar, lembaga pendidikan, serta lembaga pemerintah, (b) tingkat keinovatifan program yang dirancang dalam kerjasama sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan (c) hasil luaran lulusan dari PKBM dapat bekerja dan memiliki skill yang mampu bersaing di berbagai bidang.

Berdasarkan analisis awal terkait dengan persoalan tingkat pendidikan masyarakat desa yang masih rendah, hal yang menarik untuk dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan kerjasama antara PKBM Nurhidayah yang berlokasi di desa karangkamiri dengan pemerintah desa sukamulya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan guna menunjang peningkatan warga belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Participatory Action Research merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis (Rahmat & Mirnawati, 2020).

PAR (Participatory Action Research) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. PAR (Participatory Action Research) adalah “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR (Participatory Action Research) adalah partisipatif dalam arti bahwa ia sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial (komunitas) yang tengah berada di bawah pengkajian, dan bahwa mereka berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi itu didasarkan pada hasil penelitian. (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini dilaksanakan dengan pembuatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dilakukan observasi dan wawancara kepada pemerintah desa sukamulya dan pihak PKBM Nurhidayah untuk mengetahui kebutuhan Kerjasama yang diperlukan oleh kedua belah pihak.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa membuat Memorandum of Understanding (MoU) berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah desa sukamulya dan pihak PKBM Nurhidayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola kerjasama yang diberikan oleh pemerintah desa kepada PKBM berupa pembinaan dan pendampingan. Dukungan regulasi kebijakan dan perlindungan hukum bersifat insidental, sedangkan pendampingan, pembinaan, dan motivasi oleh stakeholder bersifat longitudinal. Bentuk kerjasama yang bersifat longitudinal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PKBM.

Proses kerjasama dimulai dengan kontrak, implementasi program dan pemantauan. Kontrak kerjasama merupakan kegiatan yang sangat penting, yang menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara PKBM dengan pemerintah desa. Kontrak kerjasama dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada tahap inilah mahasiswa menjadi jembatan antara pihak PKBM dan pemerintah desa dengan membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Pihak pertama adalah PKBM yang ditandatangani oleh ketua PKBM. Pihak kedua adalah pemerintah desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Langkah awal kerjasama adalah dengan menandatangani kontrak kerjasama atau nota kesepahaman yang biasa dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU). Penggunaan MOU dimaksudkan untuk mendukung komitmen dan profesionalisme kedua belah pihak. Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada esensi kontrak kerjasama dan berpedoman pada model kerjasama yaitu pembinaan dan pendampingan.

Pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Program yang dirancang oleh pemerintah desa meliputi sosialisasi, intervensi dan evaluasi. Penjangkauan masyarakat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut menjadi dasar perencanaan kolaboratif PKBM dan pemerintah desa agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara tepat.

Kebutuhan masyarakat merupakan modal awal untuk menarik minat masyarakat untuk berkomitmen berpartisipasi aktif. Penjangkauan masyarakat juga didukung dengan penggalangan dukungan dari tokoh masyarakat dan dukungan sosial. Intervensi dilakukan dengan membangun komitmen masyarakat dan terus menumbuhkan minat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya PKBM menyokong pelibatan masyarakat didukung oleh tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga (Saputra & Hati, 2017). Pelibatan masyarakat berbentuk perencanaan partisipatif, seperti mengidentifikasi kebutuhan secara proaktif dan memberikan ide, pendapat, dan saran untuk merencanakan proyek sesuai dengan kebutuhan. Partisipasi diimplementasikan dalam bentuk komitmen untuk tetap terlibat sebagai warga belajar, meningkatkan kehadiran dan semangat.

Penilaian partisipatif berkaitan dengan peran warga belajar dalam menilai pencapaian indikator dan tujuan pembelajaran sebagai bahan pengembangan program selanjutnya. Hal ini dijadikan indikator keberhasilan program pendidikan berkelanjutan dan sepanjang hayat.

Kerjasama antara PKBM dengan pemerintah desa, yaitu monitoring, untuk mengupayakan program pembelajaran yang berkesinambungan, konsistensi, dan indikator keberhasilan. Memantau potensi kemitraan PKBM yang dikembangkan dalam konsep multi arah sehingga dapat saling melengkapi, berkelanjutan, dan

mencapai indikator keberhasilan berupa peningkatan kualitas antar lembaga dan kepuasan kerjasama (Suharyani, 2015).

Hak dan kewajiban kedua belah pihak merupakan hal yang mempengaruhi indikator keberhasilan. Substansi hak dan kewajiban harus dinyatakan secara tertulis untuk menjelaskan batasan kewenangan antara para pihak. Hal ini harus diimbangi dengan komitmen terkait pemenuhan dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang dikembangkan oleh PKBM.

KESIMPULAN

Proses membangun kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui penyusunan kesepakatan kerjasama, implementasi rencana kerjasama, dan evaluasi. Proyek yang dilaksanakan oleh PKBM meliputi proyek kesetaraan. Model kerjasama yang dilakukan adalah pendampingan dan pembinaan berupa dukungan kebijakan dan regulasi, perlindungan hukum, pendampingan anggaran, pendampingan, pendampingan dan memotivasi masyarakat. Skema peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu penjangkauan masyarakat, intervensi, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaidah, S. (2017). Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 32(2). <https://doi.org/10.24856/mem.v32i2.541>
- Ardilah, T., Makmur, M., & Hanafi, I. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 71–77.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71.
- Saputra, F. A., & Hati, G. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Deskriptif Upaya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kampung Cerdas Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 59–78. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v18i1.102>
- Suharyani, M. . A. R. dan. (2015). Pola Kemitraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi Keberlanjutan Program Pendidikan Non Formal. *Jurnal Kependidikan*, 14 (3), 239–249.
- Widiyantoro, W. (2021). Kerjasama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan

Pemerintah Desa sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p111-119>

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Observasi dan wawancara dengan pihak PKBM Nurhidayah



Gambar 2. Observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah Desa Sukamulya



Gambar 3. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)